

DAFTAR RUJUKAN

- Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 99–110.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Atmadja et al. (2024). *Determinants of Factors that Affect Accounting Fraud in Local Government Financial Management*. *AAB&FJ*, 18(1), 148–160.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Entitas Terkait Lainnya di Singaraja* (Issue 2).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2022). *Pengelolaan Aset Sangat Penting Karena Banyak Temuan BPK Terkait Aset*. <https://sumbar.bpk.go.id/pengelolaan-aset-sangat-penting-karena-banyak-temuan-bpk-terkait-aset/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2024). *Periksa Pengelolaan Aset Pemda, Ini Hasil Temuan BPK – WARTA DIGITAL*. Warta Pemeriksa. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=57252>
- Basri, H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 9(1), 86–105.
- Citriadin, Y. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Dasar)* (Lubna, Ed.; 1st ed.). Sanabil.
- Dewi, K. B. R., & Werastuti, D. N. S. (2024). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Melalui Pengukuran *Value for Money* untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(3), 385–401.
- Dharmawan et al. (2023). *The Value of Local Wisdom From Karmaphala as The Basis Foundation of Accountability Practices in The Traditional Village of Tenganan Pegerinsingan*. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 31(2).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.

- Fathonah et al. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Journal of Law & Policy Review*, 2(2).
- Febriana et al. (2017). Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Journal Lentera Hukum*, 4(2), 131–149.
- Fitriyani, E., & Yuliansyah, R. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 19 Tahun. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Gulo et al. (2024). Implementasi Kebijakan Publik Serta Terhadap Kepentingan Publik Berdasarkan Teori Administrasi Negara Saat Ini. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 387–392.
- Hasan et al. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Hasan, Ed.). Penerbit Tahta Media Group.
- Hermawan, I. P. H., & Musmini, L. S. (2021). Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Agung Asem Kembar dalam Bingkai Yadnya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(3), 559–568.
- Hidayat, D. A. (2022, September 15). *Wujudkan Optimalisasi, Sinergi Pengelolaan Aset*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15376/Wujudkan-Optimalisasi-Sinergi-Pengelolaan-Aset.html>
- Khakim, M. M. A., & Purnomo, D. O. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 2(8).
- Komala et al. (2024). Analisis Penerapan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07. *Jurnal Akunida*, 10(1), 59–67.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Kusumawardany et al. (2024). Efektivitas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok. *Journal of Business Innovation and Accounting Research Jilid*, 1(2), 133–154.
- Labasido, E. R., & Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(2), 215–236.
- Manyo'e, E. T. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pelatihan Pola Satu Pintu Dengan Model Edward III di Kabupaten Gorontalo. *Knowledge : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2, 227–240.

- Meo et al. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 9(1), 1–12.
- Muhyiddin et al. (2022). Program Kartu Prakerja: Konsepsi dan Implementasi Kebijakan *Welfare-to-work* di Masa Pandemi Covid-19. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 1–17.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 7 Tahun 2024 Tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, peraturan.bpk.go.id (2024).
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap, Presiden Rebulik Indonesia (2010).
- Purnamawati, I. G. A., & Hatane, S. E. (2020). *Analysis of Local Government Financial Information Quality Based on Internal and External Factors. AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 11(2), 66–81.
- Purnamawati, I. G. A., & Hatane, S. E. (2024). *Collaborative Governance in Strengthening Dimensions of Competitive Advantage of Sustainable Ecotourism Villages. International Review of Management and Marketing*, 14(4), 180–190.
- Rahmatillah et al. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH GREEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EDWARD III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(3).
- Rohmah, S. N. M., & Husnurrosyidah. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(2), 96–102.
- Sudaryati, E., & Permana, T. D. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 1–13.
- Sulindawati, N. L. G. E., & Musmini, L. S. (2023). *Development of the Digital Financial Accounting I Learning Module in the Digital Nomad Era. Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 245–257.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina, Eds.; 1st ed.). AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Wahyuni, S., & Khoirudin, R. (2020). *Pengantar Manajemen Aset* (1st ed.). Penerbit Nas Media Pustaka.

- Wahyuningsih et al. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(5), 59–75.
- Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Jurnal; Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22–33.
- Werastuti et al. (2023). *Prevention Practices Accounting Fraud In Managing Village-Owned Business Units And Its Approach Using AI. Internet of Things and Artificial Intelligence Journal*, 3(2), 178–203.
- Wibawa, I. K. S., & Werastuti, D. N. (2022). Analisis Efektivitas Realisasi Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(3), 747–753.
- Wicaksana et al. (2021). Pengaruh Inventarisasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Melalui Pemanfaatan Aset Pada Pemerintah Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5514>
- Widyaningsih, A. (2022). *Accountability For Governance Of Local Government Fixed Assets. Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 180–194.
- Yuliansyah, R., & Septiani, S. F. (2020). *Fixed Assets Analysis and Its Inventory of Management and Use of Assets in the Government of East Jakarta City 2013-2016. Advances in Economics, Business and Management Research*, 127, 162–168.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). *Key Elements Of Local Government Transparency In New Public Governance. Problems and Perspectives in Management*, 18(4), 96–106.